

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran krusial dalam menopang perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya pilar utama dalam struktur ekonomi nasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024). Posisi strategis ini menunjukkan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap sistem ekonomi, tetapi aktor utama dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional, terutama saat terjadi krisis global.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro merupakan entitas dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 atau penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000,00, di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 dengan omzet maksimal Rp2.500.000.000,00, sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih hingga Rp10.000.000.000,00. Klasifikasi ini menunjukkan keberagaman skala ekonomi pelaku usaha yang menuntut kebijakan dan pendekatan pemberdayaan yang berbeda.

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong UMKM untuk masuk ke ranah digital melalui berbagai program, seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan UMKM *Go Digital*. Upaya ini sejalan dengan tren perubahan pola

transaksi masyarakat yang semakin beralih ke pembayaran non-tunai, seperti penggunaan QRIS, *e-wallet*, dan *mobile banking*. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi melalui QRIS terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial, mencapai lebih dari Rp100 triliun pada kuartal III 2023, yang mencerminkan adopsi yang masif di kalangan masyarakat (Bank Indonesia, 2024).

Menurut laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2021), kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Persentasenya meningkat dari 57,2% pada 2016 menjadi 63,9% pada 2019, kemudian menurun tajam menjadi 37,8% pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Penurunan drastis ini mencerminkan tekanan berat yang dialami sektor UMKM, seperti penurunan omzet, keterbatasan modal, dan terhambatnya rantai pasok. Namun, UMKM kembali menunjukkan ketahanannya dengan kontribusi yang melonjak signifikan menjadi 61,97% pada 2021. Fenomena serupa juga terlihat di Kabupaten Bireuen, di mana laju pertumbuhan ekonomi ikut terdampak pandemi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen (2020–2024)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-1,02
2021	4,09
2022	4,35
2023	4,38
2024	4,52

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen (2025)

Data pada Tabel 1.1, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada 2020, perekonomian daerah ini mengalami kontraksi sebesar $-1,02\%$ akibat dampak

pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas perdagangan, jasa, dan UMKM. Namun, kondisi tersebut segera membaik dengan pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya, yakni 4,09% pada 2021, 4,35% pada 2022, meningkat menjadi 4,38% pada 2023, dan kembali tumbuh stabil di angka 4,52% pada 2024. Perkembangan ini mencerminkan daya tahan ekonomi Kabupaten Bireuen sekaligus kemampuannya untuk pulih dari tekanan eksternal. Salah satu faktor penting yang menopang proses pemulihan tersebut adalah kontribusi UMKM yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian lokal (BPS Bireuen, 2025).

Dari sisi demografi, Kecamatan Kota Juang memiliki posisi strategis dengan jumlah penduduk mencapai 49.208 jiwa pada tahun 2024, menjadikannya wilayah dengan populasi terbesar kedua di Kabupaten Bireuen setelah Kecamatan Peusangan (BPS Bireuen, 2025). Kepadatan penduduk tersebut menjadikan Kota Juang sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal, khususnya dalam sektor perdagangan, industri, dan jasa.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen (2023), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kota Juang tercatat sebanyak 2.408 unit, yang seluruhnya tergolong dalam kategori usaha mikro. Adapun untuk kategori usaha kecil dan menengah, data menunjukkan tidak terdapat unit usaha yang tercatat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada usaha mikro, yang secara proporsional menjadi komponen utama dalam struktur perekonomian Kecamatan Kota Juang.

Tabel 1.2 Jumlah Usaha Mikro di Kecamatan Kota Juang Berdasarkan Sektor Usaha

No.	Sektor Usaha	Jumlah
1.	Perdagangan	1.245
2.	Industri	1.098
3.	Pertanian	12
4.	Perikanan	3
5.	Perternakan	50
Total		2.408

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan tulang punggung utama kegiatan ekonomi di Kecamatan Kota Juang, dengan jumlah 1.245 unit usaha, diikuti oleh sektor industri sebanyak 1.098 unit usaha. Dominasi usaha mikro pada sektor perdagangan mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih terpusat pada skala usaha kecil dengan tingkat digitalisasi yang relatif rendah.

Sektor perdagangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis usaha mikro yang beragam, antara lain usaha sembako, makanan dan minuman, fashion, serta usaha perdagangan lainnya. Keberagaman jenis usaha ini mencerminkan karakteristik aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Kota Juang yang didominasi oleh perdagangan kebutuhan sehari-hari dan konsumsi rumah tangga.

Usaha sembako umumnya memiliki perputaran transaksi yang tinggi dengan frekuensi harian, sehingga berpotensi besar dalam pemanfaatan digital payment untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Sementara itu, usaha makanan dan minuman cenderung lebih adaptif terhadap penggunaan platform digital, baik dalam sistem pembayaran maupun pemasaran berbasis online. Di sisi lain, usaha fashion memiliki karakteristik yang lebih dinamis dan bergantung pada tren pasar,

sehingga membutuhkan dukungan digital transformation dalam strategi pemasaran dan pengelolaan usaha.

Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa setiap jenis usaha dalam sektor perdagangan memiliki tingkat kebutuhan dan kesiapan digitalisasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana digital payment, digital transformation, dan digital banking dapat memengaruhi kinerja keuangan pada masing-masing jenis usaha tersebut, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap kondisi pelaku usaha mikro di Kecamatan Kota Juang. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat potensi peningkatan kinerja keuangan dapat dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.

Meskipun digitalisasi ekonomi telah berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia, tingkat adopsinya di daerah seperti Kecamatan Kota Juang masih tergolong rendah. Fenomena ini menggambarkan bahwa pelaku usaha mikro di Kecamatan Kota Juang telah mengenal berbagai layanan digital seperti QRIS dan *platform* pembayaran elektronik lainnya, namun penerapannya masih terbatas pada aktivitas transaksi. Integrasi teknologi ke dalam aspek pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, dan strategi pemasaran digital belum berjalan optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi peningkatan kinerja keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital belum dimanfaatkan secara maksimal. Situasi ini membuka ruang penelitian untuk menelaah sejauh mana *digital payment*, *digital transformation*, dan *digital banking* mampu mendorong kinerja keuangan pelaku usaha mikro di wilayah ini.

Kinerja keuangan merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu usaha dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan ekonomi. Penilaian kinerja keuangan umumnya dilakukan melalui beberapa indikator, seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Profitabilitas, misalnya yang diukur dengan *Return on Assets (ROA)* atau *Net Profit Margin (NPM)*, menjadi tolok ukur utama karena mencerminkan kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dari aset maupun penjualan. Likuiditas dapat diukur dengan *Current Ratio* atau *Quick Ratio* untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, sementara leverage seperti *Debt to Equity Ratio (DER)* menunjukkan tingkat risiko keuangan. Di sisi lain, rasio aktivitas digunakan untuk menilai sejauh mana aset perusahaan dimanfaatkan secara efektif dalam menghasilkan pendapatan (Setiawan et al., 2023).

Dalam penelitian ini digunakan profitabilitas sebagai indikator utama kinerja keuangan, karena profitabilitas dianggap mampu mencerminkan secara langsung keberhasilan UMKM dalam menghasilkan laba dan menjaga keberlanjutan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan et al. (2023) yang menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan dimensi paling relevan untuk mengukur kinerja keuangan UMKM, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi yang menuntut efisiensi dan inovasi.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM, seperti literasi keuangan, akses pembiayaan, dan tingkat adopsi teknologi digital. Menurut Setiawan et al. (2023), profitabilitas merupakan indikator utama kinerja keuangan karena secara langsung

mencerminkan kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dan menjaga keberlanjutan bisnis. Sementara itu, Harahap (2022) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UMKM. Namun, beberapa studi juga menunjukkan bahwa pemanfaatan *digital payment* dan *digital banking* di kalangan pelaku usaha masih terbatas, sehingga pengaruhnya terhadap profitabilitas belum sepenuhnya konsisten. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap terkait pengaruh *digital payment*, *digital transformation*, dan *digital banking* terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya di tingkat daerah.

Berdasarkan *research gap* yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali pengaruh *digital payment*, *digital transformation*, dan *digital banking* terhadap kinerja keuangan dengan indikator profitabilitas pada usaha mikro sektor perdagangan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dianggap mewakili aspek utama digitalisasi yang berpotensi memengaruhi profitabilitas, namun belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks usaha mikro di tingkat daerah.

Digital payment merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM. Istilah ini merujuk pada metode pembayaran non-tunai yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti *QRIS*, *e-wallet*, *mobile banking*, maupun *payment gateway*. Menurut Fitriana (2025), penerapan sistem pembayaran digital berpengaruh positif terhadap profitabilitas UMKM karena mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperlancar arus kas, serta mempercepat proses pembayaran secara aman dan tercatat otomatis. Pemanfaatan digital payment

juga membantu pencatatan keuangan menjadi lebih tertata, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan analisis laba dan perencanaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2025) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pembayaran digital berpengaruh positif terhadap profitabilitas UMKM karena meningkatkan volume transaksi dan memperluas jangkauan pasar. Hasil serupa diperoleh oleh Monica et al. (2024) yang menegaskan bahwa digitalisasi transaksi mendukung efisiensi operasional serta memperkuat daya saing usaha. Namun, beberapa studi lapangan menunjukkan bahwa adopsi *digital payment* di kalangan pelaku usaha mikro masih rendah akibat keterbatasan literasi digital dan preferensi terhadap transaksi tunai, sehingga dampaknya terhadap profitabilitas belum sepenuhnya konsisten di berbagai konteks wilayah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah *digital transformation*. Konsep ini dipahami sebagai proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional usaha, mulai dari sistem pencatatan keuangan, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir dan strategi bisnis agar lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Menurut Pradana et al. (2024), tingkat adopsi *digital transformation* pada UMKM dapat diukur dari sejauh mana pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akses pasar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Setiyono (2024) menunjukkan bahwa penerapan *digital transformation* pada usaha mikro dan kecil di Indonesia

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena membantu memperluas jangkauan pasar dan menekan biaya operasional. Hasil serupa juga ditemukan oleh Purnomo, Nurmalitasari, & Nurchim (2024), yang menegaskan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi serta kemampuan adaptasi UMKM di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Namun, beberapa studi juga menyoroti bahwa tingkat adopsi *digital transformation* masih bervariasi karena keterbatasan literasi digital, hambatan biaya, dan resistensi terhadap perubahan di kalangan pelaku usaha, sehingga dampaknya terhadap profitabilitas belum sepenuhnya merata di semua sektor.

Faktor terakhir yang dapat memengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah *digital banking*. *Digital banking* merujuk pada layanan perbankan berbasis teknologi digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan berbagai *platform* keuangan daring yang memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi, mengakses pembiayaan, dan mengelola rekening secara efisien. Kehadiran layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mempercepat arus kas, memperluas akses permodalan, serta menekan biaya operasional. Menurut Sari dan Nugroho (2023), *digital banking* berperan penting dalam memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam mengelola profitabilitas melalui efisiensi transaksi dan transparansi keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyawati dan Darma (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan *digital banking* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM karena mendorong kemudahan transaksi

dan akses pembiayaan digital. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Astuti dan Wijayanti (2022) yang menjelaskan bahwa penggunaan layanan perbankan digital meningkatkan kecepatan transaksi dan mempermudah pengendalian arus kas. Namun, penelitian lain menyoroti bahwa sebagian pelaku usaha mikro masih enggan memanfaatkan akibat rendahnya literasi keuangan digital, keterbatasan pemahaman terhadap produk perbankan, dan kekhawatiran terhadap keamanan transaksi daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *digital banking* memiliki potensi besar dalam meningkatkan profitabilitas dan efisiensi, dampaknya terhadap kinerja keuangan UMKM di tingkat mikro masih belum optimal dan memerlukan penguatan literasi serta dukungan infrastruktur digital yang memadai.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa temuan dari berbagai penelitian sebelumnya mengenai pengaruh digitalisasi terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa studi menegaskan adanya pengaruh positif *digital payment*, *digital transformation*, dan *digital banking* terhadap kinerja keuangan UMKM, sementara penelitian lain menemukan bahwa dampaknya belum signifikan karena keterbatasan literasi digital, hambatan biaya, maupun rendahnya tingkat adopsi teknologi di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada usaha mikro sektor perdagangan di tingkat daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *digital payment*, *digital transformation*, dan *digital banking* terhadap kinerja keuangan dengan indikator profitabilitas pada pelaku usaha mikro sektor perdagangan di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Dengan

mempertimbangkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya serta masih terbatasnya tingkat adopsi teknologi digital di kalangan pelaku usaha mikro di daerah, peneliti memandang penting untuk mengkaji lebih lanjut topik ini melalui penelitian berjudul “Pengaruh *Digital Payment*, *Digital Transformation*, dan *Digital Banking* terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *digital payment* berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen?
2. Apakah *digital transformation* berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen?
3. Apakah *digital banking* berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *digital payment* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
2. Menganalisis pengaruh *digital transformation* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

3. Menganalisis pengaruh *digital banking* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur empiris mengenai pengaruh digitalisasi terhadap kinerja keuangan, khususnya pada usaha mikro sektor perdagangan. Penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan (*research gap*) dengan mengkaji secara simultan pengaruh tiga variabel utama, yaitu *digital payment*, *digital transformation*, dan *digital banking*, terhadap profitabilitas usaha mikro. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak digitalisasi terhadap kinerja keuangan UMKM di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku UMKM, khususnya pada sektor perdagangan, mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha. Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan penggunaan *digital payment* dalam transaksi, memperluas jangkauan pasar melalui *digital transformation*, serta memanfaatkan *digital banking* untuk pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan UMKM berbasis digital. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat literasi digital pelaku usaha, memperluas infrastruktur pembayaran digital, dan mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, serta pelaku UMKM dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang inklusif di Kabupaten Bireuen.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan fintech dalam merancang produk serta layanan digital yang sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. Temuan penelitian ini juga dapat membantu lembaga keuangan meningkatkan inklusi keuangan melalui produk perbankan digital yang lebih adaptif terhadap kebutuhan usaha mikro dan kecil.